

Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakan

Workshop FLPI
Kamis, 24 Maret 2016

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**



Perkiraan Supply-Demand Daging Sapi Tahun 2015-2016

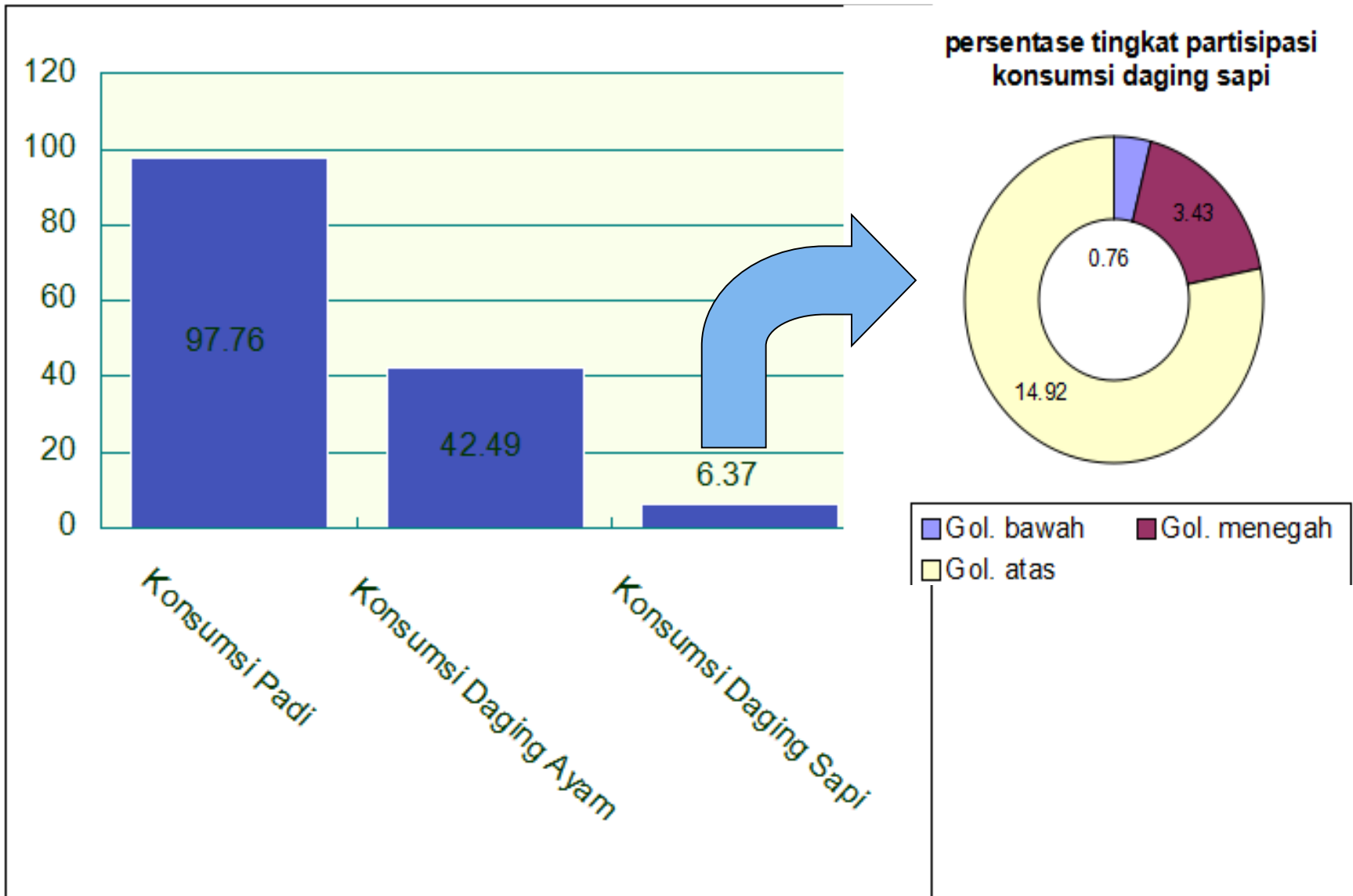
	Uraian	Tahun	
		2015	2016
I	Kebutuhan (ton)	653.982	675.220
a	Penduduk (jiwa)	255.461.700	258.705.000
b	Konsumsi per kapita (kg)	2,56	2,61
II	Produksi Lokal (ton)	416.090	441.761
a	Produksi Setara Sapi (ekor)	2.445.577	2.596.454
III	Total Impor (ton)	237.892	233.459
a	Impor Daging (ton)	95.157	93.384
b	Impor sapi (ekor)	713.676	700.378
c	Impor sapi setara daging (ton)	142.735	140.076

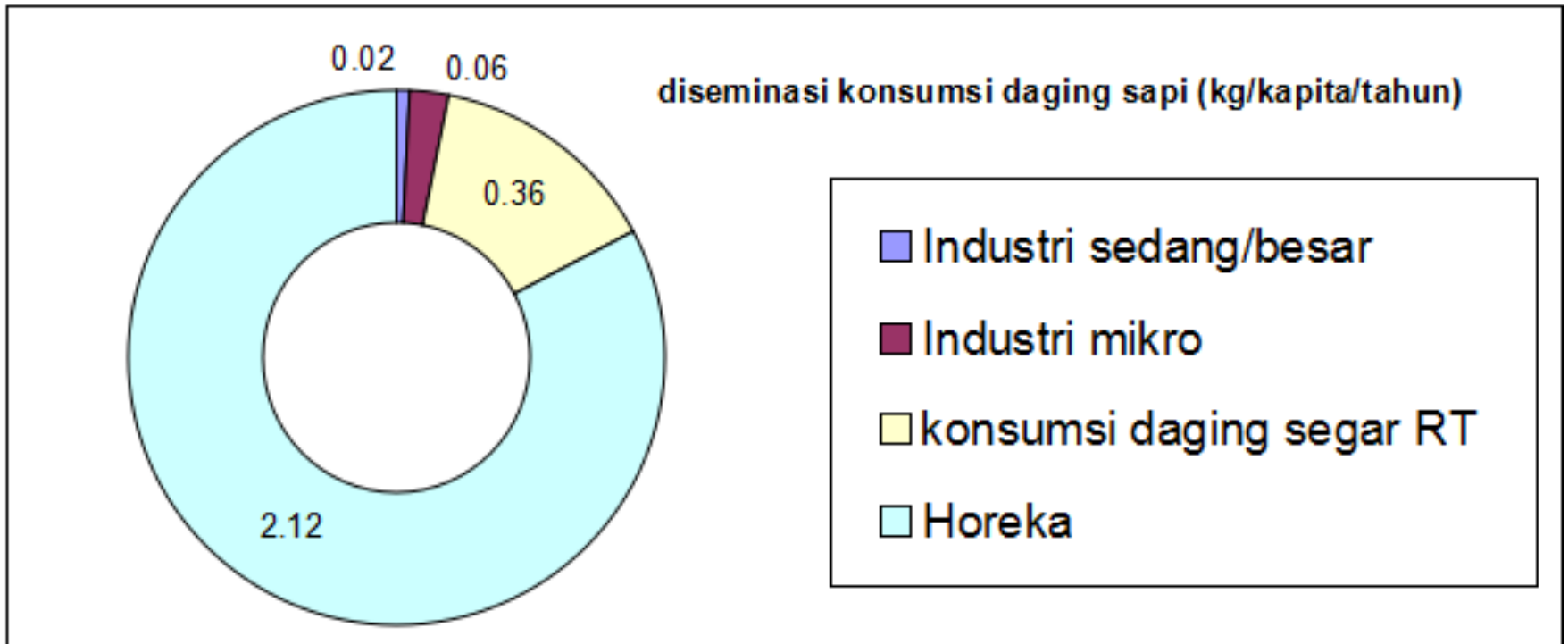
Berdasarkan data lintas kementerian, di Kementerian Perekonomian tanggal 25 Agustus 2015

Persentase tingkat partisipasi konsumsi pangan penduduk menurut jenis golongan pengeluaran triwulan I 2014

No.	Komoditi	Persentase Penduduk yang Mengkonsumsi		
		40% bawah	40 % tengah	20 % atas
10	Daging sapi	0,76	3,43	14,92
11	Daging kerbau	0,15	0,17	0,33
12	Daging kambing	0,10	0,17	0,31
13	Daging ayam ras	23,98	44,43	59,06
14	Daging ayam kampung	2,40	4,10	5,71
15	Telur ayam ras	72,17	83,02	83,63
16	Telur ayam kampung	4,30	4,36	4,82
17	Telur itik/manila	1,83	2,36	2,66

Rata-rata persentase Jenis Konsumsi Pangan Masyarakat Menurut Golongan Pengeluaran 2014





- 60% kebutuhan konsumsi daging nasional tersentra di Jabar, DKI, Jateng, DIY, & Jatim;
- Tingkat konsumsi daging per kapita paling tinggi (>10Kg/kapita/tahun) ada di DKI, Bali, Kaltim.

Kebutuhan Sentra Konsumsi

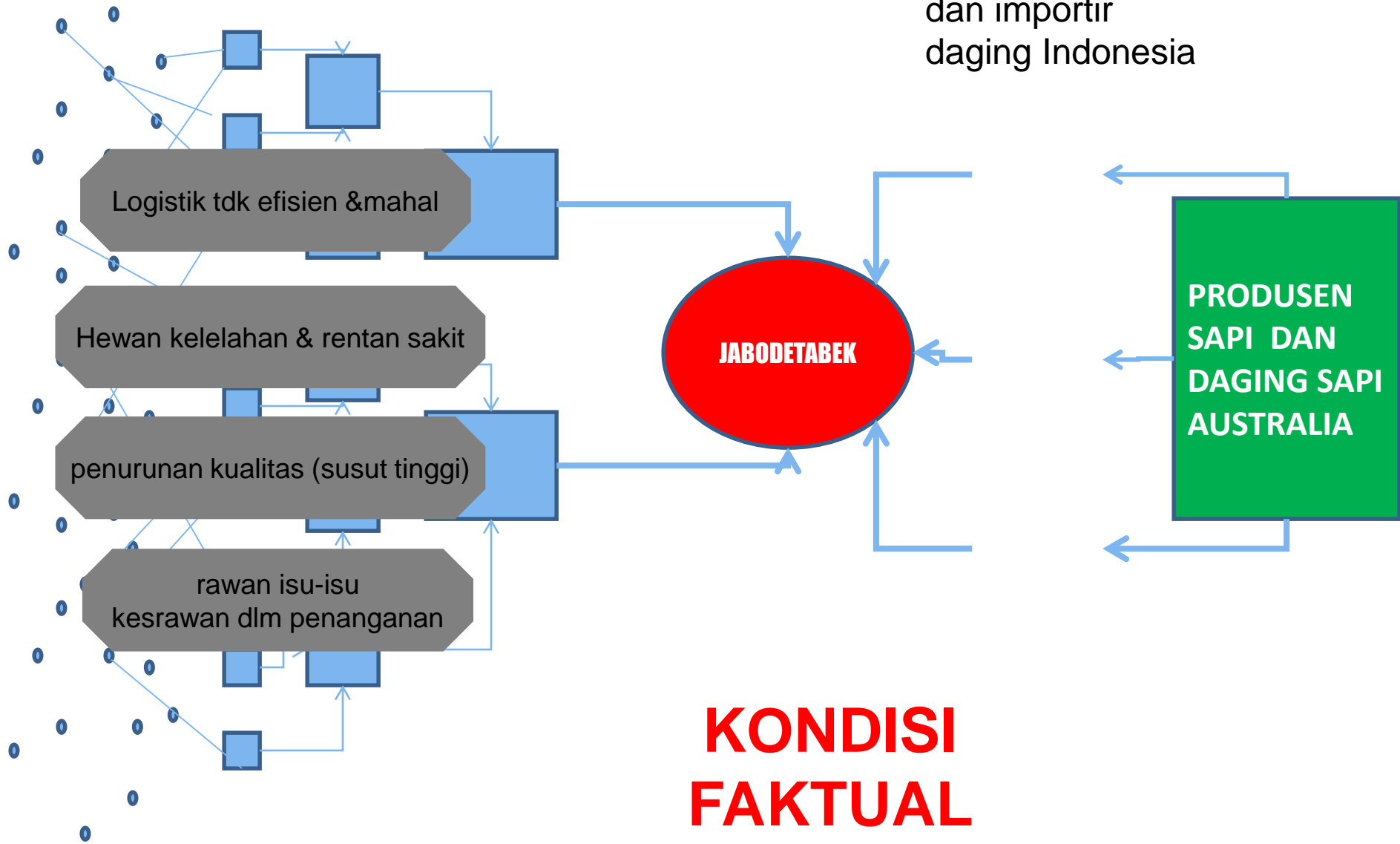
Wilayah	Penduduk Tahun		Populasi Sapi & Kerbau	
	2015	%	Jumlah (ekor)	%
Jabodetabek	31.713.362	12,41	146.491	1,03
Indonesia	255.461.700	100,00	14.240.141	100,00

- Kebutuhan DKI diperkirakan 750 ekor/hari;
- Untuk memenuhi daging sapi Jabodetabek, terutama mengandalkan pasokan sapi dan daging impor;
- Selebihnya dipasok dari daerah-daerah sentra seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

Peternak
skala kecil

←-----Pedagang --□

Feedloter
dan importir
daging Indonesia



UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bagian Kedua: Kesejahteraan Hewan

Pasal 66 (1)

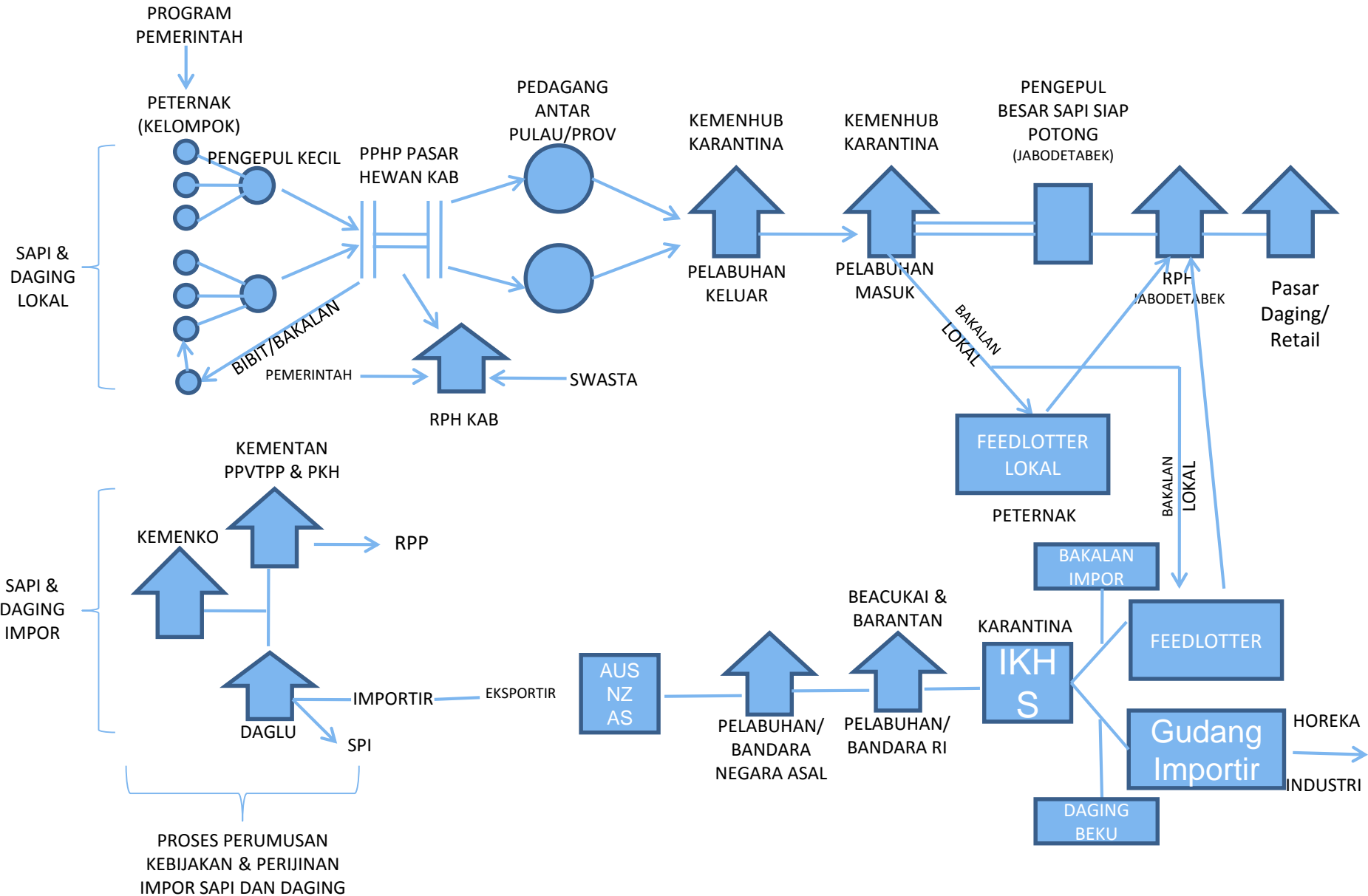
Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; **pengangkutan**; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

PP 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner & Kesejahteraan

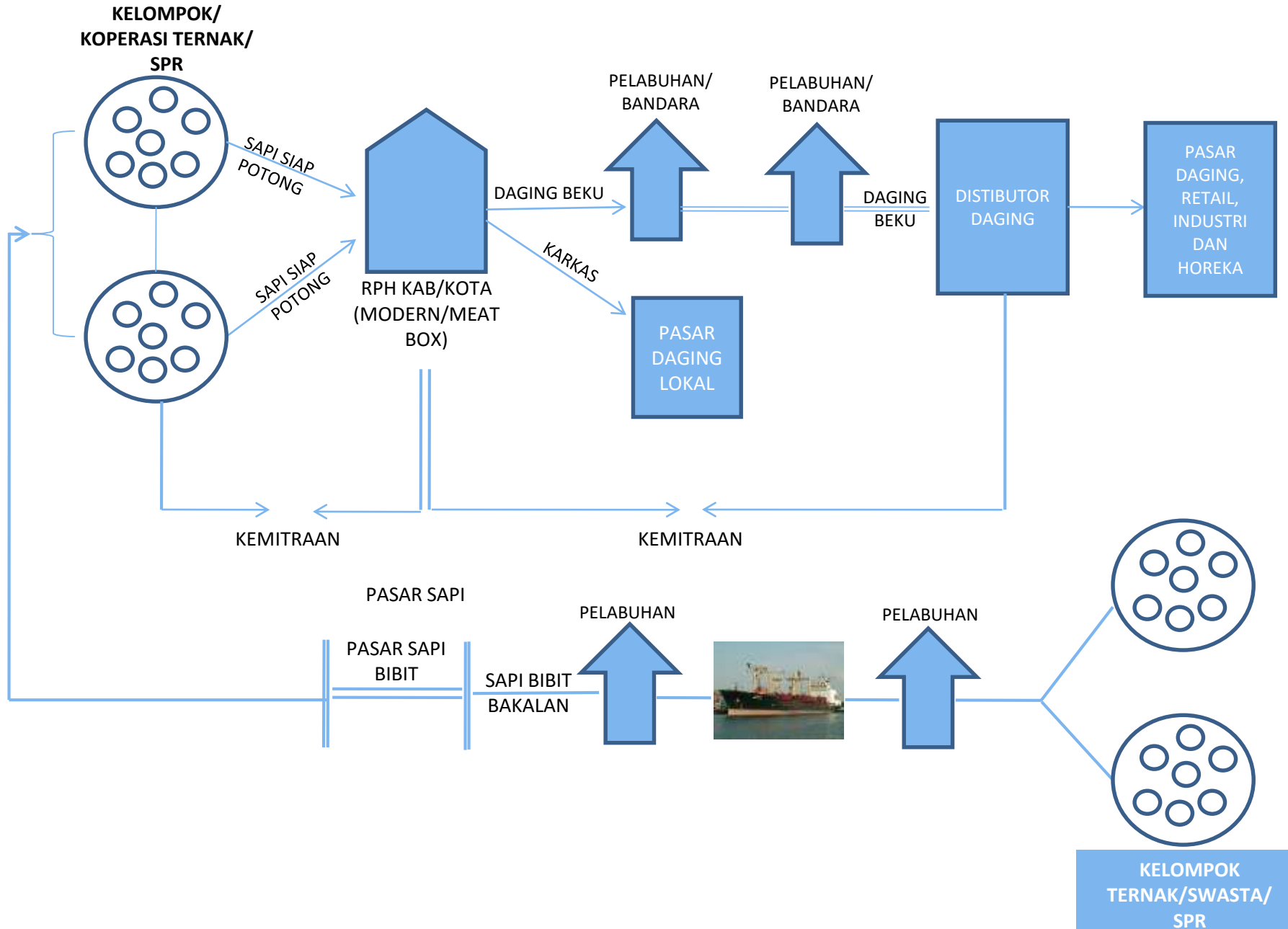
Hewan, paragraf 7: cara yang baik dalam pengangkutan hewan & produk hewan, meliputi aspek: a. **kebersihan alat angkut**; b. **kesehatan dan kebersihan Hewan**; dan c. **kesehatan dan kebersihan personel**.



" RANTAI TATA NIAGA & DISTRIBUSI SAPI POTONG DAN DAGING SAAT INI "



“POLA TATA NIAGA SAPI & DAGING KE DEPAN”



Kebijakan Pemerintah untuk mempengaruhi jalur distribusi dan rantai tata niaga sapi

- Membangun dan mengoperasikan kapal khusus ternak (target 6 kapal pengangkut ternak hingga tahun 2017);
- Mengoptimalkan peran BUMN khususnya BULOG dalam penyediaan sapi dan daging sapi;
- Memotong jalur distribusi dan tata niaga sapi dan daging sapi di daerah sentra:
 - menurunkan harga daging sapi di sentra konsumen,
 - menyokong kepastian harga di tingkat produsen (peternak);
- Menciptakan keseimbangan baru dalam *supply-demand* daging sapi di daerah sentra konsumen.



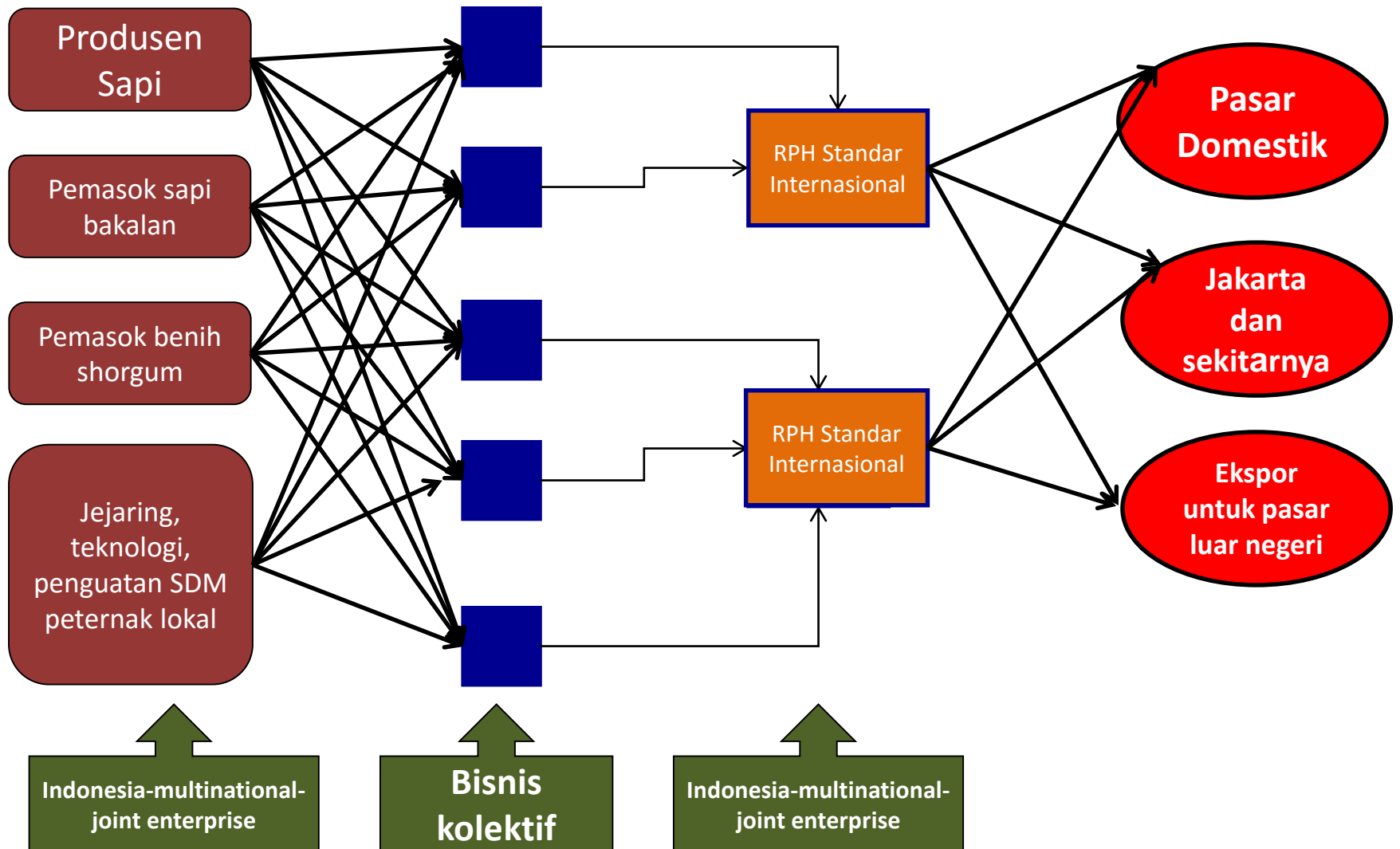
Pada tanggal 11 Desember 2015, KM Camara Nusantara 1 berhasil membawa sapi perdana asal NTT, membawa sebanyak 353 ekor sapi



Kesepakatan pertemuan dengan 47 pelaku usaha ternak sapi di NTT serta dihadiri oleh Gubernur NTT dan Kepala Staf Kodam (Kasdam) IX Udayana pada tanggal 18 Nopember 2015

1. Masa karantina sapi di Instalasi Karantina Hewan sebelumnya memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu, menjadi 1 hingga 2 hari;
2. Pemangkasan biaya penerbitan surat izin di desa;
3. Penerbitan surat izin dari kabupaten dan propinsi sebelumnya 1 hingga 2 minggu menjadi 1 hari selesai;
4. Biaya angkut sapi sebelumnya Rp 1,8 juta per ekor akan turun menjadi Rp 320 ribu dengan menggunakan kapal khusus ternak. Harga ini sudah termasuk biaya asuransi dan pakan ternak selama di kapal;
5. Persentase kuota sapi dari NTT ke DKI Jakarta sebesar 70 % dari total sapi yang dimiliki NTT;
6. Penerbitan surat rekomendasi dari daerah penerima yang sebelumnya membutuhkan waktu 3-4 hari menjadi tidak diperlukan rekomendasi.

Pola bisnis kolektif berbasis SPR





± 500 Peternak Rakyat

Satu Organisasi

Satu Manajemen

SPR

Satu SOP

Satu pintu dalam berbisnis

Satu Database



*Terima kasih atas
perhatiannya.....*

